

Strategi Iran terhadap Normalisasi Hubungan Uni Emirat Arab - Israel pada Tahun 2020

Frequency of International Relations
September, Vol 6 (2) 1-27

© The Author(s)

fetrian.fisip.unand.ac.id

Submission track :

Submitted : November 22, 2023

Accepted : March 22, 2024

Available On-line : June 14, 2024

**Muhammad Aditya Riyadi, Haiyyu Darman Moenir,
Maryam Jamilah***

Hubungan Internasional, Universitas Andalas

maryamjamilah@soc.unand.ac.id

Abstract

The normalization between the United Arab Emirates (UAE) and Israel that occurred in 2020 became a phenomenon that shocked the international community and became bad news for Iran. This is because in the normalization agreement (Abraham Accords) there are several points that have the potential to become a threat to Iran's existence and also there are several potential threats from this normalization to Iran so that Iran condemns this normalization. This research aims to describe and analyze Iran's strategy towards the normalization of UAE - Israel relations in 2020 using the offense-defense theory by Stephen Van Evera. The offense-defense theory consists of four factors that determine state strategy in security dilemma, namely military factors, geography factors, social and political order factors, and diplomatic factors. This research uses a qualitative research method with an analytical and descriptive approach and used secondary data that obtained through library research method. Based on these four factors, the researcher found that both offensive and defensive strategies have the potential to be applied by Iran regarding the normalization of relations between the UAE and Israel in 2020, due to a balanced offensive and defensive potential. The conditions for offensive action are met by Iran in terms of military and diplomatic factors, while the conditions for defensive action are met by Iran in terms of geography and social and political order factors.

Keywords: Iran, Israel, Normalization, Strategy, United Arab Emirates.

Pendahuluan

Normalisasi hubungan antara Uni Emirat Arab (UEA) dan Israel menjadi fenomena yang cukup menggemparkan di dunia internasional. Hal ini dikarenakan Israel diketahui memiliki hubungan yang renggang dengan negara-negara Arab dan baru menjalin hubungan dengan dua negara Arab saja, yakni Mesir pada tahun 1979 dan Yordania pada tahun 1994 (Wicaksono, 2020: 172). Kerenggangan hubungan dengan sejumlah negara-negara Arab ini terjadi karena Israel dianggap merebut tanah Palestina. UEA sendiri merupakan negara pendukung kemerdekaan dan kebebasan Palestina dari Israel. Bahkan, sebelumnya UEA menyangkal keberadaan dan pengakuan Israel sebagai negara. Keputusan untuk penetapan normalisasi antara UEA dan Israel tidak terlepas dari konteks sosial, yang dalam hal ini adalah ancaman Iran terhadap UEA dan Israel (Baqi, 2022: 85). Dengan kata lain, musuh bersama telah menyatukan UEA dan Israel. Anwar Gargash, Menteri Luar Negeri UEA, telah melangkah lebih jauh dengan mengatakan bahwa tindakan regional agresif Iran memaksa UEA untuk mempertimbangkan hubungan dengan Israel dengan pandangan baru (Guzansky & Marshall, 2020: 4). Dalam hal ini, Israel memberikan ruang untuk membentuk identitas kolektif bagi Israel dan UEA yang sama-sama terancam oleh program nuklir dan agresivitas Iran. Iran menjadi salah satu alasan

terciptanya normalisasi hubungan antara UEA dan Israel (Tahmi et al, 2022: 328).

Sebagai negara yang sangat memperjuangkan kemerdekaan Palestina, Iran melayangkan kritikan yang sangat keras terhadap normalisasi ini. Iran telah lama menjadi musuh Israel dan para pemimpinnya telah bersumpah untuk melanjutkan perjuangan kemerdekaan Palestina terlepas dari siapa yang berdamai dengan Israel. Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, merespon perjanjian normalisasi tersebut dan menyebutnya sebagai pengkhianatan terhadap dunia Islam, dunia Arab, negara-negara di kawasan dan Palestina (The Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center, 2020). Khamenei juga menyalahkan UEA karena membuka wilayah itu untuk Israel dan melupakan Palestina. Pada tanggal 16 Agustus 2020, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran, Mayor Jenderal Mohammad Bagheri, turut merespon normalisasi tersebut dan mengatakan bahwa pendekatan Iran terhadap UEA akan berubah setelah kesepakatannya normalisasinya dengan Israel. Terlebih setelah kunjungan Perdana Menteri Israel Naftali Bennett ke UEA, Iran mengatakan bahwa kehadiran Israel di kawasan itu mengganggu stabilitas keamanannya.

Kehadiran Israel membuat Iran merasa terancam. Normalisasi tersebut diketahui juga dapat memberikan ancaman terhadap

kepentingan dan ambisi regional Iran, yang meliputi perdagangan, cybersecurity, pengembangan program nuklir, dan dukungan Iran terhadap milisi, kekuatan proksi, dan aliansinya dengan kelompok militan di Timur Tengah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis yang digunakan untuk mengungkap fenomena serta mendeskripsikannya secara sistematis, akurat, dan faktual. Batasan dari penelitian ini juga difokuskan pada strategi Iran terhadap normalisasi hubungan antara Uni Emirat Arab dan Israel pada tahun 2020 dan tahun 2020-2023 juga ditetapkan sebagai batasan waktu dari penelitian. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini dilaksanakan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui metode studi kepustakaan (library research). Selain itu, teknik analisis data dari penelitian ini terdiri atas empat tahapan, yaitu pengelompokan data, reduksi data, interpretasi dan penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai studi pustaka di dalam penelitian ini. Peneliti memperoleh penjelasan mengenai kepentingan dan alasan Uni Emirat Arab (UEA) terkait normalisasi antara UEA dan Israel beserta aspek lainnya seperti tanggapan dari negara-negara Muslim lainnya terkait

kesepakatan tersebut dari penelitian yang ditulis oleh Raden Mas Try Ananto Djoko Wicaksono yang berjudul “Normalisasi Hubungan Uni Emirat Arab dengan Israel: Kepentingan Nasional Versus Solidaritas Negara Muslim terhadap Palestina”, penelitian yang ditulis oleh Ahmad Mudhofarul Baqi yang berjudul “From Foes to Friends: The Normalization of the United Emirates Arab and Israel Relations”, dan penelitian yang ditulis oleh A Rizki Tahmi, Mohamad Rosyidin, dan Muhammad Faizal Alfian yang berjudul “Analisis Kepentingan Nasional Uni Emirat Arab Dalam Normalisasi Hubungan Dengan Israel”.

Ketiga penelitian ini membantu peneliti untuk memahami kepentingan dan alasan UEA dalam menormalisasikan hubungannya dengan Israel beserta tingkat urgensi kepentingan tersebut, memahami bahwa ancaman agresivitas Iran di kawasan menjadi kesamaan kepentingan antara UEA dan Israel, mengetahui respon dari sejumlah negara, baik respon positif maupun negatif, khususnya Iran, yang dalam hal ini memberikan respon negatif, dan menginspirasi peneliti untuk mengetahui strategi dari Iran selaku salah satu alasan vital yang melatarbelakangi terjadinya normalisasi antara UEA dan Israel. Terlebih Iran juga menjadi alasan yang melatarbelakangi adanya kebijakan UEA ini. Untuk itu, peneliti ingin mengisi celah kekosongan dari ketiga penelitian ini yakni strategi Iran terhadap normalisasi antara UEA dan Israel.

Peneliti juga memperoleh penjelasan lengkap seputar Abraham Accords dari dua tinjauan pustaka terakhir yakni artikel yang ditulis oleh Joel Singer yang berjudul “The Abraham Accords: Normalization Agreements Signed by Israel with the U.A.E., Bahrain, Sudan, and Morocco.” dan artikel yang ditulis oleh Yoel Guzansky dan Zachary A. Marshall yang berjudul “The Abraham Accords: Immediate Significance and Long-Term Implications”. Kedua artikel ini membantu peneliti untuk memahami isi dari Abraham Accords tepatnya pada bagian UEA dan Israel sehingga peneliti dapat menganalisis poin-poin yang berpotensi untuk menyudutkan posisi Iran di Timur Tengah dan memahami bahwa ancaman dari Iran menjadi penyebab normalisasi. Oleh karenanya, peneliti ingin mengisi celah kekosongan dari kedua artikel ini yakni menganalisis salah satu fokus dari penelitian peneliti terkait strategi Iran terhadap normalisasi antara UEA dan Israel yakni strategi Iran terkait poin yang berpotensi menyudutkan posisi Iran di dalam Abraham Accords.

Hasil dan Pembahasan

Iran di Timur Tengah

Iran terletak di Asia Barat Daya dan berbatasan dengan Republik Armenia, Republik Azerbaijan, dan Laut Kaspia di utara, Turki dan Irak di barat, Teluk Persia dan Laut Oman di selatan, dan Pakistan dan Afghanistan di timur. Iran dikenal sebagai pemimpin front penolakan vis-á-vis konflik Israel-Palestina, tidak pernah

menjadi kekuatan regional ekspansionis, dan tidak memiliki tradisi untuk menginvasi negara-negara tetangga. Iran juga diketahui memberdayakan milisi, kekuatan proksi, dan beraliansi dengan organisasi-organisasi militan yang berada di negara-negara Timur Tengah seperti Popular Mobilization Forces (PMF) di Irak, Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, Presiden Assad di Suriah, dan Hamas di Palestina (UK Parliament, 2023).

Walaupun sama-sama berstatus sebagai negara muslim, Arab Saudi dan Iran terlibat dalam persaingan yang ketat di Timur Tengah. Bahkan, Arab Saudi setelahnya memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran pada tanggal 3 Januari 2016. Namun, pada tanggal 10 Maret 2023, Iran dan Arab Saudi sepakat untuk memulihkan hubungan diplomatik tujuh tahun setelah memutuskan hubungan dan ditengahi oleh Tiongkok (BBC News, 2023). Lebih dari sebagian besar tetangga regionalnya di Teluk, hubungan antara Iran dan Uni Emirat Arab (UEA) bersifat multidimensi, lintas tujuan, penuh dengan ketegangan namun tanpa adanya konfrontasi langsung, dan juga dibayangi dan diperparah oleh sejumlah konflik.

Iran diketahui merupakan negara mayoritas Muslim kedua (setelah Turki) yang menerima pembentukan negara Israel pada tahun 1950 (Haaretz, 2018). Kedua negara sempat memelihara hubungan yang baik pada masa pemerintahan Syah Mohammad Reza

Pahlavi. Namun, pada periode setelah Perang Yom Kippur 1973, Reza Shah mulai berperan aktif dan Ia sepenuhnya mendukung posisi pemerintah Mesir bahwa Israel harus mengembalikan semua wilayah yang diduduki dan mundur ke posisinya sebelum tahun 1967. Hubungan Iran-Israel setelahnya penuh dengan ketegangan dan hubungan mereka menjadi lebih buruk setelah Revolusi Iran pada tahun 1979 di tangan Ayatollah Khomeini dan berlanjut hingga saat ini. Semenjak terjadinya Revolusi Iran pada tahun 1979, kebijakan regional Iran diketahui didorong oleh ideologi dan geopolitik (MEI@75, 2009). Berikut beberapa kebijakan Iran di Timur Tengah:

1. Perang Iran-Irak.
2. Sengketa Wilayah dengan Uni Emirat Arab (UEA).
3. Pemberdayaan Milisi, Kekuatan Proksi, dan Beraliansi dengan Organisasi-Organisasi Militan yang Berada di Negara-Negara Timur Tengah (Axis of Resistance).
4. Berpartisipasi dalam Kesepakatan Nuklir Joint Comprehensive Plan of Actions (JCPOA)
5. Mendukung Palestina pada Konflik Palestina-Israel
6. Normalisasi Hubungan dengan Arab Saudi

Dari pandangan Iran, normalisasi antara Israel dan UEA bukanlah hal yang tidak terduga dan kerja sama erat berbasis keamanan antara Israel dan negara-negara Teluk Arab sudah lama diketahui oleh Iran. Iran juga memandang normalisasi antara UEA dan Israel sebagai serangan balasan terhadap pengaruh regionalnya (Chatham House, 2023). Melalui website resmi Kementerian Luar Negerinya, Iran mengutuk keras normalisasi hubungan diplomatik antara UEA dan rezim Zionis sebagai kebodohan strategis (Islamic Republic of Iran Ministry of Foreign Affairs, 2020).

Normalisasi Hubungan Uni Emirat Arab - Israel pada Tahun 2020

Pada tanggal 13 Agustus 2020, secara mengejutkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kesepakatan normalisasi antara Israel dengan Uni Emirat Arab (UEA). Kesepakatan tersebut dicapai dalam percakapan telepon antara Netanyahu, Trump, dan Putra Mahkota Uni Emirat Arab, Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Proses persetujuan dan penandatanganan setelahnya dilaksanakan pada tanggal 15 September 2020 di White House Lawn dan perjanjian normalisasi tersebut kemudian dikenal sebagai Abraham Accords (Wicaksono, 2020: 172). Israel diwakili oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, UEA diwakili oleh Menteri Luar Negeri Abdullah bin Zayed Al Nahyan, dan Amerika Serikat sebagai saksi sekaligus fasilitator diwakili oleh Presiden Donald

Trump. Dengan ditandatanganinya Abraham Accords, maka normalisasi hubungan antara Israel dan UEA ditetapkan secara resmi pada tanggal 15 September 2020. Israel setelahnya membuka kedutaannya di Abu Dhabi dan UEA membuka kedutaannya di Tel Aviv.

Sebelum kesepakatan ini, diketahui telah terdapat sejumlah hubungan informal antara Israel dan UEA. Adapun beberapa keuntungan yang diperoleh oleh kedua negara adalah keuntungan ekonomi, politik, keamanan, dan pariwisata. Dari sisi Iran, diketahui beberapa poin yang terdapat di dalam Abraham Accords dapat turut mengancam dan menyudutkan kedudukan Iran di wilayah Timur Tengah. Hal ini dapat dilihat dari poin kedelapan, poin kesebelas, dan poin ketujuh yang disepakati yang juga memperlihatkan campur tangan Amerika Serikat. Adanya poin tersebut memberikan peluang bagi Israel untuk menjejakkan langkahnya di sekitar kawasan UEA karena Israel dan UEA akan menjalankan serangkaian kebijakan kerja sama dan akan mengganggu stabilitas keamanan Iran, memberikan peluang bagi negara-negara Arab yang lain untuk ikut menormalisasikan hubungannya dengan Israel, dan menyudutkan posisi Iran karena kedua negara dengan bantuan Amerika Serikat akan berupaya untuk menstabilkan Timur Tengah dari ancaman agresivitas Iran.

Sebelum normalisasi hubungan antara Israel dan UEA ditetapkan secara resmi pada tanggal 15 September 2020, Iran telah menjalankan serangkaian usaha untuk membatalkan normalisasi antara kedua negara tersebut. Pada tanggal 15 Agustus 2020, Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) yang merupakan bagian dari militer resmi Iran, dalam pernyataannya juga telah meminta pimpinan UEA untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka. Usaha juga telah dilakukan oleh sejumlah tokoh lainnya.

Setelah terjadinya normalisasi, sejumlah petinggi Iran juga turut memberikan respon terhadap normalisasi tersebut. Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, merespon perjanjian normalisasi tersebut dan menyebutnya sebagai pengkhianatan terhadap dunia Islam, dunia Arab, negara-negara di kawasan dan Palestina. Khamenei menyalahkan UEA karena membuka wilayah itu untuk Israel dan melupakan Palestina. Presiden Iran, Hassan Rouhani, juga turut mengutuk perjanjian tersebut dan menyebutnya sebagai pengkhianatan terhadap aspirasi rakyat Palestina, Muslim, dan Yerusalem. Tanggapan juga turut diberikan oleh sejumlah petinggi lainnya.

Analisis Strategi Iran terhadap Normalisasi Hubungan Uni Emirat Arab - Israel pada Tahun 2020

1. Strategi Iran berdasarkan Faktor Militer

Menurut teori offense-defense, keunggulan teknologi, doktrin, dan postur kekuatan militer suatu negara akan dapat membantu suatu negara untuk bertindak ofensif. Dalam keadaan dilema keamanan, negara akan bertindak ofensif apabila negara tersebut memiliki keunggulan teknologi, doktrin, dan postur kekuatan militer. Artinya, operasi militer ofensif dianggap lebih menguntungkan daripada operasi defensif (bertahan) yang mana perang dan konflik internasional akan lebih mungkin terjadi. Dengan kata lain, negara yang memiliki keunggulan dalam teknologi, doktrin, dan postur kekuatan militer akan lebih mudah untuk menguasai wilayah dan menghancurkan negara lain, daripada hanya mempertahankan negaranya sendiri (Stephen van Evera, 1998: 16). Sedangkan apabila teknologi, doktrin, dan postur kekuatan militer suatu negara tidak sekuat negara lain, maka negara tersebut akan bertindak untuk bertahan (defense).

Berdasarkan analisis yang telah dilaksanakan, diketahui Iran memenuhi syarat untuk bertindak ofensif karena Iran memiliki keunggulan teknologi, doktrin, dan postur kekuatan militer atas UEA dan Israel. Dengan kata lain, Iran akan lebih mudah untuk menguasai wilayah dan menghancurkan negara lain, daripada hanya mempertahankan negaranya sendiri karena Iran memiliki keunggulan dalam teknologi, doktrin, dan postur kekuatan militer. Apabila dibandingkan, Iran nyaris mengungguli seluruh indikator militer UEA

dan Israel dan hanya tidak unggul pada kekuatan udara dan geografi (Global Firepower, 2023). Selain itu, Iran juga dimasukkan oleh Global Firepower ke dalam 10 besar pada beberapa bidang termasuk total kekuatan armada tank tempur, total kekuatan armada kendaraan Multiple Launch Rocket Projector yang digerakkan sendiri, dan total tenaga militer aktif yang tersedia.

Global Firepower juga memaparkan bahwa pada bulan Januari 2023, Iran memiliki lebih dari 4.000 tank dan lebih dari 1.000 proyektor roket. Personel militer aktif Iran berjumlah 575.000 dan merupakan yang terbesar ketujuh di dunia. Pada tahun 2022, pengeluaran militer Iran juga meningkat menjadi 6847 USD juta (6.847 B USD). Terkait bukti dari tindakan ofensif Iran pada faktor militer, diketahui tidak terdapat peningkatan aktivitas militer maupun penyerangan secara langsung terhadap UEA dan Israel, namun hanya terdapat ancaman eksplisit dari Pemerintah Iran pada tanggal 15 Agustus 2020 untuk melancarkan serangan terhadap UEA atas kesepakatannya untuk menormalisasikan hubungan dengan Israel (Arab News, 2020). Selain itu, terdapat juga pernyataan mengenai pendekatan Iran yang akan berubah terhadap UEA setelah kesepakatannya normalisasinya dengan Israel yang diungkapkan oleh Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran, Mayor Jenderal Mohammad Bagheri pada tanggal 16 Agustus 2020. Dengan demikian, Iran memenuhi syarat untuk bertindak ofensif pada faktor militer.

2. Strategi Iran berdasarkan Faktor Geografi

Menurut teori offense-defense, dalam keadaan dilema keamanan, apabila geografi suatu negara tidak menguntungkan (dipisahkan oleh pembatas seperti lautan, danau, gunung, sungai lebar, hutan lebat, gurun tanpa jejak, penghalang alami lainnya, atau wilayah nasional bergunung-gunung atau berhutan lebat), negara akan berfokus untuk bertahan (defense). Tindakan ofensif seperti penaklukan akan lebih sulit ketika geografi melindungi negara dari invasi. Namun, apabila kondisi geografi suatu negara memungkinkan dan tidak dipisahkan, serta didukung dengan faktor lainnya, maka negara akan cenderung bertindak untuk menyerang (offense). Berdasarkan analisis yang telah dilaksanakan, diketahui Iran memenuhi syarat untuk bertindak defensif karena Iran memiliki geografi yang tidak menguntungkan. Hal ini dikarenakan Iran sendiri dibatasi dan dikelilingi oleh pegunungan dengan gurun di tengahnya dan di sisi keempat dibatasi oleh lautan. Wilayah nasional Iran juga bergunung-gunung.

Dalam hal ini, seluruh perbatasan Iran dilindungi dengan baik oleh barisan pegunungan yang cukup besar, khususnya Pegunungan Zagros di barat (Newlines Institute, 2020). Laut Kaspia juga membatasi Iran di utara dan Teluk Persia dan Laut Oman juga membatasi Iran di selatan. Oleh karenanya, sesuai dengan teori

offense-defense, Iran akan berfokus untuk bertahan (defense). Selain itu, pusat populasi kritis Iran yang terkonsentrasi di pegunungan dan terisolasi dengan baik dan medan pegunungan Iran yang mempunyai banyak opsi untuk membangun pekerjaan pertahanan yang cukup besar, termasuk jaringan terowongan yang luas yang dapat mengimbangi kelemahan Iran dalam kekuatan dan pertahanan udara juga mendukung Iran untuk bertindak defensif. Lokasi Iran juga memungkinkan Iran untuk melancarkan ancaman pembalasan yang cukup signifikan yang memperkuat bagian pencegahan dari strateginya. Terkait bukti dari tindakan defensif Iran pada faktor geografi, tidak ditemukan data yang memperlihatkan adanya tindakan maupun kebijakan yang defensif dari Iran yang berkaitan dengan letak geografinya. Dengan demikian, Iran memenuhi syarat untuk bertindak defensif pada faktor geografi.

3. Strategi Iran berdasarkan Faktor Tatahan Sosial dan Politik

Menurut teori offense-defense, rezim populer pada umumnya lebih baik dalam menyerang (offense) dan bertahan (defense) daripada rezim yang tidak populer (Stephen van Evera, 1998: 19). Dalam keadaan dilema keamanan, apabila rezim suatu negara lebih populer daripada negara lain, maka negara tersebut akan cenderung bertindak menyerang (offense) karena mereka lebih baik dalam menyerang (offense) dan bertahan (defense). Pemerintah populer dapat dengan

lebih baik meningkatkan pasukan yang lebih besar dan lebih setia yang dapat melewati benteng perbatasan negara lain dan dapat beroperasi jauh dari rumah dengan dukungan logistik yang lebih sedikit. Hal ini memberikan kekuatan ofensif yang lebih besar kepada rezim populer. Sedangkan apabila rezim suatu negara tidak sepopuler negara lain, maka negara tersebut akan bertindak untuk bertahan (defense).

Berdasarkan analisis yang telah dilaksanakan, diketahui Iran memenuhi syarat untuk bertindak defensif karena Iran pada saat ini dapat diklasifikasikan sebagai rezim yang tidak populer. Hal ini diperkuat dengan data yang menunjukkan bahwa popularitas rezim Iran berada pada titik terendah pada tahun 2021, tidak hanya di Irak namun juga di negara-negara Arab lain seperti Lebanon (Arab News, 2021). Data tersebut membuktikan terdapatnya penurunan pada popularitas rezim Iran. Rezim Iran juga diketahui memperoleh protes, demonstrasi, dan pemberontakan dari rakyatnya sendiri yang tidak menyetujui regulasi yang ada pada rezim Iran dan mengkehendaki perubahan rezim. Hal ini dapat dilihat pada sejumlah protes, demonstrasi, dan pemberontakan yang terjadi di Iran seperti demonstrasi yang disebabkan oleh tuduhan kecurangan pemilihan presiden pada tahun 2009, demonstrasi terkait harga gas yang melonjak pada tahun 2019, sejumlah protes jalanan yang bertransformasi menjadi kekerasan pada tahun 2017, dan yang

terbaru yakni demonstrasi usai meninggalnya Mahsa Amini yang dimulai pada bulan September 2022 yang mengkehendaki perubahan rezim.

Terlebih, survei pendapat yang diadakan pada tahun 2023 yang mencakup 158.000 orang di Iran memperlihatkan bahwa lebih dari 80 persen responden menolak rezim saat ini yang berbentuk Republik Islam dan lebih memilih pemerintahan yang demokratis (Iran International, 2023). Oleh karenanya, sesuai dengan teori offense-defense, Iran akan bertindak untuk bertahan (defense) karena pada saat ini rezim Iran tidak sepopuler negara lainnya karena memperoleh protes, demonstrasi, dan pemberontakan dari rakyatnya sendiri yang mengkehendaki perubahan rezim, tidak terpenuhinya indikator yang menunjukkan bahwa rezim Iran termasuk ke dalam rezim yang populer, dan data yang menunjukkan bahwa popularitas rezim Iran berada pada titik terendah pada tahun 2021, yang membuktikan terdapatnya penurunan pada popularitas rezim Iran. Terkait bukti dari tindakan defensif Iran pada faktor tatanan sosial dan politik, Pemerintah Iran yang berfokus pada demonstrasi dan pemberontakan terhadap rezimnya dan tidak berfokus untuk membentuk kebijakan yang ofensif cukup untuk membuktikan strategi Iran yang defensif pada faktor ini. Dengan demikian, Iran memenuhi syarat untuk bertindak defensif pada faktor tatanan sosial dan politik.

4. Strategi Iran berdasarkan Faktor Diplomatik

Terdapat tiga jenis pengaturan diplomatik yang memperkuat pertahanan, yaitu sistem keamanan kolektif, aliansi pertahanan, dan perilaku penyeimbang oleh negara netral. Ketiganya akan dapat menghalangi suatu negara untuk bertindak ofensif dengan menambahkan sekutu ke negara yang defensif (Stephen van Evera, 1998: 21). Misalnya, negara-negara dalam sistem keamanan kolektif menjanjikan bantuan timbal balik melawan agresi oleh setiap anggota sistem. Negara yang bertindak ofensif akan menghadapi koalisi pertahanan yang besar apabila sistem tersebut beroperasi. Negara-negara dalam aliansi defensif menjanjikan saling membantu melawan agresor dari luar, membuat agresor tersebut kalah jumlah dengan melawan lawan. Sedangkan negara netral akan bertindak sebagai penyeimbang ketika mereka bergabung dengan yang lebih lemah dari dua koalisi yang bersaing untuk memulihkan keseimbangan di antara mereka. Dalam keadaan dilema keamanan, apabila suatu negara memiliki sistem keamanan kolektif, aliansi pertahanan, dan terdapat perilaku penyeimbang oleh negara netral, maka negara tersebut akan cenderung bertindak menyerang (offense) karena mereka juga sudah memperoleh dukungan dalam pertahanan (defense). Sedangkan apabila suatu negara tidak memiliki sistem keamanan kolektif, aliansi pertahanan, dan tidak terdapat perilaku penyeimbang oleh negara netral, maka negara tersebut akan bertindak untuk tidak menyerang

dan bertahan (defense). Hal ini dikarenakan apabila negara tersebut tetap bersikeras untuk bertindak menyerang (offense), maka negara tersebut harus menghadapi ketiga jenis pengaturan diplomatik tersebut terlebih dahulu dan itu tentu akan menyusahakan mereka.

Berdasarkan analisis yang telah dilaksanakan, diketahui Iran memenuhi syarat untuk bertindak ofensif karena Iran memiliki sistem keamanan kolektif, aliansi pertahanan, dan terdapat perilaku penyeimbang oleh negara netral. Terkait sistem keamanan kolektif, Iran sendiri merupakan salah satu anggota dari sistem keamanan kolektif yang ada pada saat ini yakni Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan menjadi salah satu dari 50 anggota. Terkait aliansi pertahanan, Iran diketahui memiliki pakta pertahanan dan perjanjian kerja sama militer tambahan pada bulan Maret 2007 dengan Suriah, memperoleh tawaran kerja sama pertahanan, termasuk pada elektronik, pertahanan udara, dan rudal dari Rusia, dan memiliki milisi, kekuatan proksi, dan beraliansi dengan organisasi-organisasi militan yang berada di negara-negara Timur Tengah yakni Axis of Resistance (Popular Mobilization Forces (PMF) di Irak dan Hizbullah di Lebanon). Terkait terdapatnya perilaku penyeimbang oleh negara netral, dalam hal ini diketahui Arab Saudi dapat dikatakan sebagai negara yang paling tepat untuk menjalankan peran sebagai negara netral yang bertindak sebagai penyeimbang. Hal ini dikarenakan, Iran dan Arab Saudi sepakat untuk menormalisasi hubungan setelah tujuh

tahun memutuskan hubungan dan ditengahi oleh Tiongkok pada tanggal 10 Maret 2023.

Walaupun sebelumnya Arab Saudi dan Israel sempat memperbincangkan koordinasi pertahanan melawan Iran dalam pembicaraan rahasia dan Arab Saudi sudah memiliki hubungan diplomatik lebih dulu dengan Uni Emirat Arab (UEA), terdapatnya kesepakatan normalisasi antara Iran dan Arab Saudi tetap akan memberikan posisi yang netral bagi Arab Saudi, karena pada saat ini Arab Saudi telah memiliki hubungan diplomatik yang resmi dengan Iran. Israel sendiri diketahui belum memiliki hubungan diplomatik dengan Arab Saudi hingga saat ini. Oleh karenanya, sesuai dengan teori offense-defense, maka Iran akan bertindak ofensif karena Iran memiliki sistem keamanan kolektif, aliansi pertahanan, dan terdapat perilaku penyeimbang oleh negara netral. Sesuai dengan teori offense-defense, Iran akan bertindak ofensif karena ketiga instrumen diplomatik tersebut telah mendukung Iran dalam pertahanan. Terkait bukti dari tindakan ofensif Iran pada faktor diplomatik, diketahui tidak ditemukan data yang memperlihatkan adanya tindakan maupun kebijakan yang ofensif dari Iran yang berkaitan dengan sistem keamanan kolektif, aliansi pertahanan, dan perilaku penyeimbang oleh negara netralnya. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa Iran memenuhi syarat untuk bertindak ofensif pada faktor diplomatik karena Iran memiliki ketiga jenis pengaturan diplomatik. Dengan

demikian, Iran memenuhi syarat untuk bertindak ofensif pada faktor diplomatik.

Dapat diamati bahwa dari keempat faktor, dua faktor memenuhi syarat untuk bertindak ofensif dan dua faktor lainnya memenuhi syarat untuk bertindak defensif sehingga diperoleh hasil yang seimbang. Oleh karenanya, kedua strategi berpotensi untuk diterapkan oleh Iran karena terdapat potensi ofensif dan defensif yang berimbang. Bukti dari tindakan ofensif Iran dapat dilihat dari terdapatnya ancaman dan perubahan pendekatan Iran terhadap UEA pada faktor militer, sedangkan bukti dari tindakan defensif Iran dapat dilihat dari tidak terdapatnya tindakan maupun kebijakan Iran yang ofensif pada faktor geografi dan faktor tatanan sosial dan politik. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa meskipun Pemerintah Iran menunjukkan kecaman langsung secara ofensif, namun pada kenyataannya Iran tidak bisa sepenuhnya ofensif karena adanya dua faktor yang menghalangi Iran untuk bertindak ofensif yakni faktor geografi dan faktor tatanan sosial dan politik.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis menggunakan teori offense-defense yang terdiri atas empat faktor yang menjadi penentu strategi negara dalam keadaan dilema keamanan yakni faktor militer, faktor geografi, faktor tatanan sosial dan politik, dan faktor diplomatik, ditemukan

bahwa kedua strategi yakni ofensif dan defensif berpotensi untuk diterapkan oleh Iran terhadap normalisasi hubungan UEA - Israel pada tahun 2020 karena terdapat potensi ofensif dan defensif yang berimbang. Dalam hal ini, syarat untuk bertindak ofensif dipenuhi oleh Iran pada faktor militer dan faktor diplomatik, sedangkan syarat untuk bertindak defensif dipenuhi oleh Iran pada faktor geografi dan faktor tatanan sosial dan politik. Terkait syarat ofensif, Iran memenuhi syarat untuk bertindak ofensif pada faktor militer karena Iran memiliki keunggulan teknologi, doktrin, dan postur kekuatan militer atas UEA dan Israel. Iran juga memenuhi syarat untuk bertindak ofensif pada faktor diplomatik karena Iran memiliki sistem keamanan kolektif, aliansi pertahanan, dan terdapat perilaku penyeimbang oleh negara netral.

Sedangkan terkait syarat defensif, Iran memenuhi syarat untuk bertindak defensif pada faktor geografi karena Iran memiliki geografi yang tidak menguntungkan dikarenakan wilayah Iran dikelilingi, dibatasi, dan dilindungi oleh penghalang alami yakni pegunungan dan lautan. Iran juga memenuhi syarat untuk bertindak defensif pada faktor tatanan sosial dan politik karena Iran pada saat ini dapat diklasifikasikan sebagai rezim yang tidak populer. Bukti dari tindakan ofensif Iran dapat dilihat dari terdapatnya ancaman dan perubahan pendekatan Iran terhadap UEA pada faktor militer, sedangkan bukti dari tindakan defensif Iran dapat dilihat dari tidak terdapatnya

tindakan maupun kebijakan Iran yang ofensif pada faktor geografi dan faktor tatanan sosial dan politik. Oleh karenanya, disimpulkan bahwa meskipun Pemerintah Iran menunjukkan kecaman langsung secara ofensif, namun pada kenyataannya Iran tidak bisa sepenuhnya ofensif karena adanya dua faktor yang menghalangi Iran untuk bertindak ofensif yakni faktor geografi dan faktor tatanan sosial dan politik.

Daftar Pustaka

- Aljazeera. "Iran's Khamenei urges reversal of Arab-Israeli normalisations." Aljazeera. 24 Oktober 2021. Diakses pada 12 Januari 2023. <https://www.aljazeera.com/news/2021/10/24/irans-khamenei-urges-reversal-of-arab-israeli-normalisations>.
- Aljazeera. "وتصف إسرائيل حضور تثبيت من تحذر إيران.. للإمارات بينيت زيارة بعد" بالمخرب المنطقة في دورها." Aljazeera. 14 Desember 2021. Diakses pada 12 Januari 2023. <https://www.aljazeera.net/politics/2021/12/14/بينيت-زيارة-بعد-من-تحذر-إيران-للإمارات>.
- Arab News. "Iran threatens to attack UAE over Israel deal." Arab News. 16 Agustus 2020. Diakses pada 9 Juni 2023. <https://www.arabnews.com/node/1720081/amp>.
- Baqi, Ahmad Mudhofarul. "From Foes to Friends: The Normalization of the United Emirates Arab and Israel Relations." *Insignia Journal of International Relations* 9, no. 1 (April 2022): 80-95. Diakses pada 6 Januari 2023.
- Butcher History Institute. "Iran and the Geopolitics of the Middle East." Foreign Policy Research Institute. 27 Oktober 2012. Diakses pada 16 Juni 2023.

<https://www.fpri.org/conference/iran-and-the-geopolitics-of-the-middle-east/>.

David B. Green. "From Friends to Foes: How Israel and Iran Turned Into Arch-enemies." *Haaretz*. 8 Mei 2018. Diakses pada 6 April 2023. <https://www.haaretz.com/middle-east-news/iran/2018-05-08/ty-article-magazine/how-israel-and-iran-went-from-allies-to-enemies/0000017f-f633-d887-a7ff-fef71e7f0000>.

Delcorde, Raoul. "Iran: Geopolitics and Regional Environment." *Studia Diplomatica* 55, no. 2 (2002): 41-47. Diakses pada 14 Juni 2023.

Dr. Raz Zimmt. "Iran following the UAE-Israeli Normalization Agreement: Responses and Analysis." *The Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center*. 13 September 2020. Diakses pada 10 Januari 2023. <https://www.terrorism-info.org.il/en/iran-following-the-uae-israeli-normalization-agreement-responses-and-analysis/>.

Global Firepower. "2023 Iran Military Strength." *Global Firepower*. Terakhir diulas 9 Januari 2023. Diakses pada 23 Juni 2023. https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.php?country_id=iran#:~:text=For%202023%2C%20Iran%20is%20ranked,on%2001%2F09%2F2023.

Global Firepower. "2023 Israel Military Strength." *Global Firepower*. Terakhir diulas 19 Januari 2023. Diakses pada 24 Juni 2023. https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.php?country_id=israel.

Global Firepower. "2023 United Arab Emirates Military Strength." *Global Firepower*. Terakhir diulas 1 Januari 2023. Diakses pada 24 Juni 2023. https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.php?country_id=united-arab-emirates#:~:text=For%202023%2C%20United%20Arab%20Emirates,0.00%20is%20considered%20'perfect'.

- Guzansky, Yoel dan Zachary A. Marshall. "The Abraham Accords: Immediate Significance and Long-Term Implications." *Israel Journal of Foreign Affairs*, (2020): 1-11. Diakses pada 10 Januari 2023.
<https://doi.org/10.1080/23739770.2020.1831861>.
- Iran International Newsroom. "Opinion Survey Reveals Overwhelming Majority Rejecting Iran's Regime." *Iran International*. 4 Februari 2023. Diakses pada 1 Juli 2023.
<https://www.iranintl.com/en/202302036145>.
- Islamic Republic of Iran Ministry of Foreign Affairs. "Statement on Establishment of UAE-Israel Diplomatic Ties." *Islamic Republic of Iran Ministry of Foreign Affairs*. 14 Agustus 2020. Diakses pada 1 Juni 2023.
<https://en.mfa.ir/portal/newsview/606638>.
- Kayhan Barzegar. "The Geopolitical Factor in Iran's Foreign Policy." *MEI@75*. 29 Januari 2009. Diakses pada 20 Juni 2023.
<https://www.mei.edu/publications/geopolitical-factor-irans-foreign-policy>.
- Majid Rafizadeh. "Iran regime's popularity is now at its lowest ebb." *Arab News*. 11 November 2021. Diakses pada 1 Juli 2023.
<https://www.arabnews.com/node/1966346/amp>.
- Omar Lamrani. "Iran's Conventional Military Capabilities." *Newlines Institute*. 9 Juli 2020. Diakses pada 25 Juni 2023.
<https://newlinesinstitute.org/iran/irans-conventional-military-capabilities/>.
- Philip Loft. "Iran's influence in the Middle East." *UK Parliament*. 14 April 2023. Diakses pada 17 Juni 2023.
<https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-9504/>.
- Raffi Berg. "Iran and Saudi Arabia to renew ties after seven-year rift." *BBC News*. 10 Maret 2023. Diakses pada 19 Juni 2023.
<https://www.bbc.com/news/world-middle-east-64906996>.
- Reuters Staff. "Iranian commander says Tehran's approach to UAE will change after Israel deal." *Reuters*. 16 Agustus 2020.

Diakses pada 12 Januari 2023.

<https://www.reuters.com/article/us-israel-emirates-iran-idUSKCN25C0BV>.

Sanam Wakil dan Neil Quilliam. "The Abraham Accords and Israel-UAE normalization." Chatham House. 28 Maret 2023. Diakses pada 6 Juni 2023.

<https://www.chathamhouse.org/2023/03/abraham-accords-and-israel-uae-normalization/07-how-leverage-abraham-accords-challenges-and>.

Tahmi, A Rizki, Mohamad Rosyidin, dan Muhammad Faizal Alfian. "Analisis Kepentingan Nasional Uni Emirat Arab Dalam Normalisasi Hubungan Dengan Israel." *Journal of International Relations* 8, no. 3 (2022): 325-333. Diakses pada 10 Januari 2023.

United Nations I.R. Iran. "About the UN in Iran." United Nations I.R. Iran. Diakses pada 2 Juli 2023. <https://iran.un.org/en/about/about-the-un>.

United States. Abraham Accords Peace Agreement: Treaty of Peace, Diplomatic Relations and Full Normalization between the United Arab Emirates and the State of Israel. 15 September 2020. United States Treaties.

United States Institute of Peace. "Iran's Deepening Strategic Alliance with Russia." United States Institute of Peace. 25 April 2023. Diakses pada 4 Juli 2023. <https://iranprimer.usip.org/blog/2023/feb/24/iran%E2%80%99s-deepening-strategic-alliance-russia>.

United States Institute of Peace. Syria's Alliance with Iran. Mona Yacoubian. 1-4. Mei 2007. Diakses pada 2 Juli 2023. https://www.usip.org/sites/default/files/syria_iran.pdf.

Van Evera, Stephen. "Offense, Defense, and the Causes of War." *International Security* 22, no. 4 (April 1998): 5-43. Diakses pada 12 April 2023. <https://doi.org/10.2307/2539239>.

Wicaksono, Raden Mas Try Ananto Djoko. "Normalisasi Hubungan Uni Emirat Arab dengan Israel: Kepentingan Nasional Versus

Solidaritas Negara Muslim terhadap Palestina.” Jurnal ICMES 4, no. 2 (Desember 2020): 171-194. Diakses pada 6 Januari 2023.

Declaration of Conflict Interest

The Author declares that there is no conflict of interest regarding the publication of this article.